

kiprah agroforestri

World Agroforestry Centre (ICRAF) Indonesia

Volume 3, no. 3 - Desember 2010

Sebuah kisah tentang Pak Mawardi, pencari lele dari desa Aloe Bateung Broek, Desa Kuala Seumayam, mengeluhkan sulitnya mencari lele akibat banyaknya lahan gambut yang dikeringkan dan diubah menjadi kebun, disajikan sebagai pembuka KIPRAH edisi ini.

Pemahaman alur jual beli kayu jati di tingkat petani masih merupakan kendala saat ini. Artikel kedua membawa kita ke pemahaman untuk mencari nilai rantai perdagangan kayu jati, berikut peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Sebuah OPINI mengenai "bagaimana hutan sagu berpotensi dalam REDD+ karena dapat menyerap karbon?" Selain sumber bahan makanan pokok bagi masyarakat Papua, juga merupakan habitat keanekaragaman hayati, yang tumbuh alami selayaknya hutan alam yang memiliki peluang sebagai penyerap karbon.

Masih dengan artikel menarik untuk diulas yaitu tentang agroforest tembawang, di Kalimantan Barat, yang dalam pengelolaannya masih dikelola secara adat masyarakat Suku Dayak. Penulis menyajikannya dengan cukup detail yang mencakup tiga hal utama dalam aspek konservasi dan nilai-nilai sosial budaya yang luhur.

Kopi luak... siapa yang tidak kenal dengan nikmatnya kopi ini. Dengan harga jual yang menggiurkan karena termahal di dunia. Meskipun biji kopi berkualitas tinggi ini diambil dari sisa kotoran luwak, namun kopi ini menjadi begitu masyur dikalangan penikmat kopi. Berdasarkan penelitian terakhir, hasil panen biji kopi oleh luwak yang dikandangkan tidak sebaik kualitas kopi yang dipanen oleh luwak liar. Ikuti cerita uniknya dalam liputan simposium nasional yang diselenggarakan di pulau Bali, Oktober lalu.

"Ini sebuah awal contoh yang baik dari suatu usaha pertanian padi di lahan pasang surut. Dengan teknologi sederhana mampu mencegah lahan dari banjir atau luapan air pasang. Hasil enam ton gabah kering panen per hektar sebuah hal yang luar biasa" sambut Akhmad Yadi, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan kepada Pak Usub, seorang penebang kayu yang berubah haluan menjadi petani peladang menetap yang menularkan ilmunya kepada masyarakat sekitarnya. Rubrik PROFIL TOKOH yang bisa menjadi contoh untuk kita dan sekaligus sebagai artikel terakhir KIPRAH edisi ini.

Tiga tahun KIPRAH Agroforestri ini berjalan dengan menyuguhkan banyak artikel menarik yang bermanfaat untuk pembacanya. Dan di penghujung tahun 2010 KIPRAH Agroforestri sudah menerbitkan tujuh edisi. Semoga kami dapat terus menyuguhkan kisah-kisah agroforestri lainnya di tahun mendatang yang tentunya bermanfaat untuk semua pembaca di negeri Indonesia tercinta ini.

Selamat Tahun Baru 2011, All the Best!

Tikah Atikah

daftar isi



- 3 Catatan perjalanan ke Kuala Seumayam, kecamatan Darul Makmur, kabupaten Nagan Raya: Asa di hutan rawa gambut yang tersisa
- 5 Memahami rantai perdagangan kayu jati
- 8 **opini:** Hutan sagu: potensinya dalam REDD+
- 10 Tembawang: bukan sekedar sistem agroforestri
- 14 Sistem Wanatani: masih tetap idola pengelola kebun kopi
- 16 **profil tokoh:** Pak Usub: dari Serumpun berkarya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar sungai Lamandau



Pohon Mahoni (*swetania macrophila*), Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Foto: Asep Ayat

kiprah agroforestri

Redaksional

Kontributor

Aulia Perdana, Bambang Soeharto, Degi Harja,
Elok Mulyoutami, Janudianto, Kurniatun Hairiah, Subekti Rahayu

Editor

Subekti Rahayu, Elok Mulyoutami

Desain dan Tata Letak

Josef Cesario Arinto

Foto Sampul

Asep Ayat



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

World Agroforestry Centre

ICRAF Southeast Asia Regional Office
Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia
☎ 0251 8625415; fax: 0251 8625416
✉ icraf-indonesia@cgiar.org
www.worldagroforestry.org/sea

Agroforestri adalah sistem pemanfaatan lahan yang memadukan pohon dengan tanaman lain dan/atau ternak

Kami mengajak pembaca untuk berbagi cerita dan pendapat mengenai agroforestri. Silahkan kirim naskah tulisan (500-1000 kata) disertai foto beresolusi besar. Saran dan kritik juga dapat ditulis didalam blog KIPRAH di <http://kiprahagroforestri.blogspot.com/>

Asa di hutan rawa gambut yang tersisa...

Oleh Elok Mulyoutami

Kami tiba di Kuala Seumayam Pesisir bersama dengan tiga orang pencari ikan lele yang datang dari desa Aloe Bateung Broek. “Belum pasang bubu Pak?” tanyaku kepada Pak Mawardi, salah seorang pencari ikan Lele yang kami temui di pesisir. “Belum, nanti sore baru kami pasang... dan besok barulah kami tengok hasilnya...” , jawabnya.

Kuala Seumayam merupakan salah satu pintu masuk ke daerah hutan rawa gambut di Ekosistem Tripa yang masih tersisa. Masih banyak masyarakat desa sekitar yang menggantungkan hidupnya di wilayah ini untuk mencari ikan lele, bawal, jurung, lokan dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Kuala Seumayam Pesisir merupakan sebuah desa yang terletak di tepi muara Krueng (sungai) Seumayam dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Akibat konflik antara TNI dan GAM desa ini habis dibombardir pasukan bersenjata pada akhir tahun 2003, hingga kemudian desa ini dikosongkan. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004, hantaman tsunami menghabiskan infrastruktur yang sudah setengah hancur. Hanya separuh gedung sekolah dan sebuah madrasah yang masih tersisa. Hingga saat ini Kuala Seumayam Pesisir menjadi desa yang tidak berpenghuni, karena masyarakatnya direlokasi ke Desa Kuala Seumayam yang berada di arah hulu Sungai Seumayam, sekitar dua jam perjalanan dengan menggunakan perahu motor (*robin*) dari pesisir. Desa baru ini memiliki luasan sekitar 16 ha dengan penduduk sebanyak 57 KK. Sebagian besar (80%) masyarakat desa ini berprofesi sebagai pencari ikan, baik di sungai, di rawa maupun di laut.

Mereka menangkap ikan kerling atau jurung (genus: *Tor*), bawal (*Colossoma macropomu*), kerang sungai atau lokan (*Polymesoda sp.*), udang dan kepiting di sungai Kuala Seumayam dan menjualnya ke pasar lokal. Dalam waktu seminggu mereka dapat mengumpulkan 2 – 8 kg ikan bawal yang dijual dengan harga Rp. 30.000 per kg. Mereka juga mengumpulkan lokan meskipun hanya sekali seminggu dengan cara menyelam hingga ke dasar sungai tanpa menggunakan peralatan selam yang memadai. Dalam sehari, mereka bisa memperoleh satu karung

atau setara 20 kg dengan harga Rp. 110.000 per karung. Lokan mudah diperoleh pada saat air surut.

Selain itu, mereka juga mencari ikan lele. Sebelum Tsunami, seorang nelayan bisa memperoleh 30 – 50 kg lele per hari. Bahkan, menurut informasi warga Kuala Seumayam mereka pernah menangkap ikan lele rawa yang berukuran besar atau biasa dikenal sebagai Lele Dumbo. Oleh para ahli, jenis ikan ini dikatakan sama dengan jenis lele afrika atau *Clarias gariepinus*. Namun, penurunan jumlah lokan dan ikan lele justru dirasakan oleh masyarakat sejak berakhirnya konflik antara GAM dan TNI yaitu setelah tahun 2005. Ramadani, staf YEL di Alue Bilie menyatakan,

“Sejak konflik berakhir, produksi ikan di sungai menurun kira-kira 60%, mungkin karena setelah damai... lahan mulai banyak dibuka untuk pembangunan rumah serta untuk lahan pertanian...”. Ia juga menambahkan “Limbah pabrik yang dibuang ke sungai melalui kanal kecil semakin memperparah kondisi yang ada... ikan semakin berkurang, lokan yang diperoleh pun semakin sedikit...”.

“Kalau dulu, di halaman belakang rumahpun kami bisa mengambil banyak lele, tetapi sekarang lele sudah mulai jarang didapat... kalau dapat, kita harus mencarinya ke rawa-rawa gambut... dan salah satu lokasi rawa yang masih cukup bagus ya di Kuala Seumayam ini...” ungkap Pak Mawardi.



Foto-foto oleh Elok Mulyoutami



Clarias gariepinus yang dikenal sebagai lele afrika atau lele dumbo yang ternyata banyak ditemukan di TRIPA (foto: Ian Singleton)

bubu (perangkap ikan). Biasanya mereka menginap 3 - 4 malam di lokasi, memasang bubu pada sore atau malam hari, dan mengambil hasil lele keesokan harinya. Buah kelapa sawit dan kelapa yang dibusukkan atau kacang kuning digunakan sebagai umpan.

Meskipun demikian, hasil yang mereka peroleh jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan sebelum tahun 2005. Satu kelompok nelayan yang terdiri dari 2 – 3 orang hanya mendapatkan 100 – 150 kg per minggu dengan harga jual berkisar Rp 9.000 – Rp. 16.000 per kilogram. Secara kasar, pendapatan nelayan lele per minggu berkisar antara Rp 300.000 – Rp. 800.000 per orang. Warga desa tersebut juga menegaskan bahwa sejak areal hutan gambut berkurang, ukuran ikan lele yang mereka temui semakin kecil. Kini, sangat jarang orang bisa mendapatkan ikan lele berukuran besar seperti dulu. Rotan dan madu yang dulu menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Kuala Seumayam sekarang juga sudah jarang ditemukan. “Sudah jarang ada rotan di hutan, kan hutannya pun sudah tinggal sedikit... walaupun ada hanya kami ambil untuk membuat bubu lele saja..”, demikian penjelasan seorang pengrajin anyaman rotan di Kuala Seumayam. Kini, pohon madu di hutan rawa gambut juga sudah jarang ditemukan, sehingga mereka sulit mencari madu.

Hutan rawa gambut dengan kondisi tutupan yang masih baik yang saat ini masih tersisa di Ekosistem Tripa hanya sekitar 6000 ha, berada di Desa Kuala Seumayam Pesisir (desa lama). Di lokasi inilah masyarakat miskin dari Desa Kuala Seumayam dan Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya serta beberapa desa lain di sekitarnya menggantungkan hidupnya. Luasan ini berarti hanya sepertiga jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2001 dimana areal berhutannya sekitar 18000 ha.

Meskipun pada tahun 1998, daerah ini dinyatakan sebagai bagian dari Kawasan Ekosistem Leuseur yang notabene merupakan kawasan lindung, namun ada perusahaan besar yang dapat memiliki HGU dan secara legal mengelola lahan di kawasan tersebut. Tumpang tindih status lahan ini perlu segera dibenahi. Terlebih lagi ancaman alih fungsi lahan menjadi areal perkebunan pada areal hutan rawa gambut tersisa yang terjadi belakangan ini. Beberapa fakta menunjukkan bahwa upaya alih fungsi lahan seringkali mengabaikan nilai ekologis hutan rawa gambut, termasuk juga manfaat ekonomis bagi masyarakat lokal yang subsisten. Bagaimana jika areal hutan yang tersisa ini betul-betul beralih fungsi? Kemana lagi masyarakat lokal akan mencari sumber penghidupan?

“Sekarang semakin banyak lahan gambut yang dikeringkan dan diubah menjadi kebun, akibatnya yaaa... rawa tempat dimana ikan tinggal menjadi semakin sedikit...” lanjutnya.

Sekarang mereka harus mengeluarkan biaya dan meluangkan waktu berhari-hari untuk mendapatkan ikan lele. Sekelompok kecil nelayan yang terdiri dari 2 – 3 orang pergi ke lokasi desa lama di Kuala Seumayam Pesisir dengan menggunakan perahu motor (*robin*) sampan atau (*jalo*) menuju rawa-rawa berhutan untuk memasang

Foto: Elok Mulyoutami



Memahami rantai perdagangan kayu jati

Oleh Aulia Perdana

“Mengapa kita diperlakukan seperti pencuri ketika mengirim kayu, padahal semua persyaratan dan legalitas penebangan sudah dipenuhi?”. Pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang pedagang kayu jati di kota Wonosari, Gunung Kidul ini menyulut berbagai pertanyaan kritis lainnya yang menuntut jawaban lebih mendalam. Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mengungkap rantai perdagangan jati dari petani hingga ke pedagang kayu yang saling berlomba mencari keuntungan diantara biaya-biaya yang tak terduga.

Jati (*Tectona grandis*) merupakan salah satu spesies pohon komersial yang memiliki nilai jual tinggi karena telah dikenal sebagai bahan baku plywood, lantai, furnitur dan kerajinan. Di pulau Jawa, sebagian besar pohon jati diproduksi oleh Perhutani. Sekitar 512 ribu m³ kayu jati dihasilkan oleh Perhutani pada tahun 2007 dan sebanyak 200 ribu m³ kayu jati kualitas menengah telah dijual oleh perusahaan ini.

Selain Perhutani, ribuan petani juga menanam jati meskipun total produksinya tidak terdokumentasi dengan baik. Sensus perdagangan nasional tahun 2003 menunjukkan bahwa 80 juta pohon jati berada di lahan rakyat dan 25% diantaranya siap tebang.

Kabupaten Gunung Kidul memiliki potensi yang sangat besar dalam industri kayu jati. Sebanyak 1.130.290 batang atau sekitar 50,8 m³ kayu jati dari Gunung Kidul diangkut dalam bentuk kayu bulat ke wilayah lain, sebagian besar ke Jepara untuk industri furnitur dan ke Rembang untuk bahan baku kapal.

Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan DI Yogyakarta tahun 2007, menunjukkan luas hutan jati rakyat DIY sekitar 58.486,6 hektar dan separuhnya (29.230 hektar) berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Luasan tersebut ditanami sekitar 19.211.715 batang pohon jati yang merupakan 70,4% dari seluruh pohon jati di DIY.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kayu jati di Indonesia yang cukup besar, petani jati menghadapi berbagai

kendala dalam mengelola tanaman jatinya agar menguntungkan. Kendala-kendala tersebut antara lain: (1) teknik silvikultur yang kurang memadai sehingga menghasilkan kualitas kayu yang rendah; (2) kurangnya modal sehingga petani mengalami kesulitan jika harus menunggu rotasi pertumbuhan pohon; (3) ketidakpahaman akan informasi pasar yang menyebabkan harga jual rendah Petani sering menjadi korban biaya transaksi yang seharusnya ditanggung oleh pedagang; (4) kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada petani. Misalnya saja, prosedur perijinan penebangan dan pengiriman yang dirancang untuk perusahaan kayu berskala besar diaplikasikan pada petani kecil, sehingga menimbulkan biaya tak terduga.

Memahami alur jual beli kayu jati di tingkat petani

Petani umumnya menjual kayu jati dalam bentuk pohon yang masih berdiri di lahan mereka. Informasi tentang jati yang akan dijual diperoleh



Foto: Iwan Kurniawan

para pedagang kayu dari perantara yang disebut sebagai makelar kayu. Setelah terdapat kesepakatan harga dan pedagang kayu membayar kepada makelar kayu, penebangan dilakukan oleh pedagang kayu jati. Diagram alur jual beli kayu yang umum terjadi di kalangan petani kayu jati seperti terlihat pada Gambar 1.

Sistem seperti ini memunculkan risiko yang cukup besar bagi petani dan pedagang. Petani kehilangan kesempatan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi karena pembeli tidak melihat langsung ukuran pohon yang akan dijual, sedangkan pedagang berspekulasi dengan margin keuntungannya karena pembayaran harus dilunasi sebelum pohon ditebang. Sementara itu pedagang masih harus menanggung biaya pengurusan dokumen yang tidak selalu sama di tiap desa serta biaya transaksi tak terduga lainnya.

Dalam kajian alur pemasaran kayu jati, beberapa peran penting pedagang diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram alur jual beli kayu dari tingkat petani

1. Sebagai fasilitator pencarian, bersama dengan makelar pedagang mencari pohon jati, untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan pasar. Pedagang akan melakukan survey ke lokasi pohon yang siap ditebang untuk menaksir harga pohon dan bernegosiasi dengan petani. Di samping itu, pedagang juga menghubungi para calon pembeli untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan kayu mereka dan harga penawaran pembelannya. Dalam hal ini pedagang benar-benar menjadi perantara produsen dan konsumen kayu jati dengan tujuan memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli ini;
2. sebagai penyortir yaitu memilih kayu yang sesuai dengan keinginan konsumen. Pedagang mengumpulkan kayu sesuai dengan tingkat kualitas yang sama untuk dijual ke konsumennya;
3. sebagai pendata contact person dalam saluran pemasaran. Petani tidak perlu menghubungi satu persatu pembeli kayu jati glondongan, tetapi cukup menghubungi makelar dan pedagang kayu, selanjutnya pedanglah yang akan melakukan pencarian pembeli. Begitu juga sebaliknya, jika konsumen membutuhkan kayu maka pedagang akan dihubungi untuk mencari kayu yang sesuai dengan keinginannya.

Bilamana dilihat dari sisi nilai, ketiga peran tersebut merupakan kegiatan

Tabel 1. Distribusi biaya yang dibebankan ke pedagang dalam alur pemasaran kayu jati

Alur Pasar	Biaya
Penguasaan fisik	Penyimpanan & pengiriman
Kepemilikan	Biaya penyimpanan
Promosi	Penjualan langsung
Negosiasi	Survey & perijinan
Pembiayaan	Syarat & ketentuan pembelian & penjualan
Penanggungangan risiko	Penjaminan harga, avkir, pungutan liar, pertanggungangan kerugian
Pembayaran	Penagihan hutang

yang meningkatkan nilai produk (*value-added activities*) yang menyertai proses transformasi bentuk pohon ke kayu glondongan. Ketiga peran pedagang di atas melibatkan berbagai komponen biaya dengan bermacam-macam interaksi, yaitu komponen penguasaan fisik, kepemilikan, promosi, negosiasi, pembiayaan, penanggungangan risiko, dan pembayaran yang semuanya memiliki beban biaya masing-masing. Di pihak pedagang, pada setiap alur pemasaran ada biaya yang dikeluarkan yang bersifat *sunk cost* atau tidak dapat dipulihkan lagi karena harga pohon ditawarkan, disepakati dan dilunasi sebelum pohon ditebang. Harga jual ke konsumen disesuaikan dengan penawaran pembeli karena konsumen pasti tidak akan mau menaikkan harga beli dan pedagang juga tidak bisa banyak menurunkan harga jual. Dalam hal ini muncullah biaya yang menjadi beban pedagang kayu yang tercantum dalam tabel distribusi biaya (Tabel 1).

Beberapa kebijakan yang berimplikasi pada biaya tak terduga

Permasalahan lain adalah perbedaan biaya transaksi, misalnya ijin tebang berbeda antar satu desa dengan desa lainnya, ada desa yang mengikuti aturan dari dinas ada pula yang menggunakan aturan sendiri. Hal ini mengakibatkan pembebanan biaya tinggi pada pedagang. Biaya-biaya yang rentan ini masih ditambah biaya tak terduga lain yang meresahkan para pedagang, misalnya jika harus mengirim kayu ke luar propinsi.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk mengangkut hasil hutan yang berasal dari hutan hak masih dipegang teguh oleh kebanyakan pedagang kayu. Sebenarnya peraturan tersebut telah diubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007 untuk pengangkutan hasil

Foto: Iwan Kurniawan



hutan kayu yang berasal dari hutan hak (lahan milik) masyarakat. Perubahan tersebut mulai berlaku 24 Agustus 2007 terutama Pasal 1g yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnyanya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.

Perubahan PERMENHUT tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kayu dari lahan rakyat cukup berkembang dan banyak diminati oleh industri kayu serta memiliki potensi pasar yang besar. Namun yang terjadi di lapangan, banyak kendaraan angkutan kayu diberhentikan oleh aparat berwenang yang menganggap pengangkutan tersebut menyalahi aturan pengangkutan. Mereka berpegang pada peraturan yang melindungi kelestarian kawasan hutan terhadap perilaku manusia yang berkaitan dengan pembalakan liar (*illegal logging*) yang diatur pada pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU. Terutama, pasal 78 ayat 1-15 yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap segala pelanggaran dari ketentuan pasal 50 tersebut.

Kebijakan kehutanan dalam Permenhut No. 55 tahun 2006, yang memberikan kewenangan kepada perusahaan kayu untuk mengeluarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), ternyata juga memiliki celah untuk berkembangnya modus baru pembalakan liar yang melibatkan

masyarakat. Ada kelemahan dalam kebijakan tersebut, yaitu kesulitan pengawasan apabila ada kayu liar yang dibawa masyarakat untuk disisipkan di penampungan kayu dan disahkan agar menjadi legal. Pihak berwenang mensinyalir bahwa sudah banyak cukong kayu menggunakan modus baru dengan mendanai masyarakat untuk membatat hutan. Untuk mencegah terjadinya hal ini, pihak berwenang menggunakan peraturan tentang pembalakan liar agar dapat menghentikan dan menginterogasi pengangkutan kayu ke luar propinsi. Jika pengangkut bisa menunjukkan keabsahan dokumen serta peraturan yang lebih detil maka pihak berwenang akan sepenuhnya membebaskan jalannya pengangkutan atau membebaskan dengan syarat. Syarat inilah yang menambah deretan biaya tak terduga yang dibebankan kepada pedagang.

Beberapa pembelajaran

Pembelajaran dari tumpang tindih peraturan dan permasalahan pemasaran kayu jati di Gunung Kidul mengarahkan kepada beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pengembangan masyarakat perlu memberikan perhatian terhadap upaya penguatan kapasitas petani jati dan pedagang perantara kayu jati dalam strategi pemasaran kayu mereka. Perhatian khusus perlu difokuskan pada penerapan sistem kelas mutu dan pengukuran kayu bulat pada tingkat kebun/desa. Pemerintah daerah dapat

memanfaatkan sistem penilaian pohon yang diusulkan oleh kegiatan ICRAF di Kabupaten Gunung Kidul untuk mengurangi risiko kerugian petani maupun pedagang dalam proses jual beli kayu jati.

2. Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pengembangan masyarakat perlu memfasilitasi petani dengan menyediakan sistem informasi pasar kayu jati yang lebih baik, seperti antara lain melalui siaran radio untuk memantau perkembangan harga serta kualitas kayu jati yang dibutuhkan industri kayu.
3. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kelompok-kelompok petani dengan menghubungkan mereka ke jaringan industri kayu, seperti melalui pengembangan kontrak jangka panjang antara kelompok petani jati dengan perusahaan mebel bersertifikat.
4. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyederhanakan aturan-aturan dalam perdagangan kayu (SKSKB dan SKSHH) yang berpeluang meningkatkan biaya transaksi dalam perdagangan kayu. Disarankan agar aturan tata usaha kayu jati dimasukkan dalam skema Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu.

Diharapkan terdapat titik temu antara pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait dengan pemasaran kayu jati agar bisa menghasilkan solusi yang saling menguntungkan untuk menghidupkan mesin pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelola pohon jati.

Foto: Iwan Kurniawan



Hutan sagu: potensinya dalam REDD+

Oleh Subekti Rahayu dan Degi Harja

REDD adalah suatu upaya penurunan emisi dari sektor deforestasi dan degradasi hutan yang diinisiasi pada COP 12 di Bali tahun 2007, yang artinya penebangan hutan dan alih guna hutan harus dihindari dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca*. Seperti telah kita ketahui bahwa meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pemanasan global akhir-akhir ini.

Seiring berjalannya waktu muncul suatu pemikiran bahwa tidak hanya deforestasi dan degradasi hutan yang harus dihindarkan, tetapi keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna yang ada di dalam hutan secara otomatis dapat dilestarikan dengan cara tersebut. Berdasarkan pada isu ini, maka ada wacana yang dikenal dengan REDD+, yaitu REDD plus konservasi keanekaragaman hayati.

Sagu (*Metroxylon spp.*) merupakan salah satu jenis keanekaragaman hayati tumbuhan asli Asia Tenggara yang tumbuh secara alami di dataran atau rawa dengan sumber air yang melimpah. Indonesia merupakan negara yang memiliki luasan sekitar 50% dari sagu dunia dan 85% diantaranya terdapat di Papua yang tersebar di Waropen Bawah, Sarmi, Asmat, Merauke, Sorong, Jayapura, Manokwari, Bintuni, Inawatan, dan beberapa daerah yang belum terinventarisasi.

Di Papua, sagu merupakan salah satu sumber karbohidrat selain umbi-umbian dan beras. Oleh karena itu keberadaan hutan sagu sangat penting artinya bagi masyarakat Papua sebagai sumber bahan makanan pokok. Satu batang pohon sagu yang diolah menjadi sagu siap makan, dapat mencukupi untuk kebutuhan satu

keluarga dalam sebulan. Begitu pentingnya hutan sagu bagi masyarakat Papua, hingga kepemilikan dan proses pemanenannya diatur secara adat. Hutan sagu dimiliki oleh sekelompok keluarga dalam satu famili. Pada umumnya, satu famili memiliki dua sampai tiga lokasi hutan sagu.

Hutan sagu sebagai penyerap karbon

Berdasarkan fungsinya sebagai sumber bahan makanan pokok, maka kemungkinan hutan sagu dialihgunakan relatif kecil, apalagi kepemilikannya diatur secara adat dan tumbuh secara alami seperti layaknya hutan alam, sehingga memiliki peluang sebagai penyerap karbon. Hasil pengukuran cadangan karbon pada hutan sagu di Sentani (Kota Jayapura) dan Kabupaten Jayapura, Papua menunjukkan bahwa hutan sagu dapat menyimpan karbon rata-rata 53 ton/ha

Foto: Degi Harja





Foto: Subekti Rahayu

Foto: Degi Harja

dengan populasi anakan sekitar 400 pohon/ha, tanaman muda 80 pohon per ha dan tanaman siap panen 20 pohon per ha. Kisaran cadangan karbon pada hutan sagu sekitar 53 ton/ha tergantung komposisi strata pertumbuhan sagu dan jenis pohon lain yang ada di dalamnya (Gambar 1).

Plot dengan cadangan karbon tinggi (Plot-1) memiliki kepadatan populasi sagu yang lebih rapat yaitu sekitar 700 anakan per hektar dan 100 pohon muda per hektar. Populasi sagu yang tinggi, tentunya diikuti nekromasa yang tinggi pula. Hampir semua nekromasa pada hutan sagu berasal dari pelepah sagu yang kering. Sedangkan pada plot dengan cadangan carbon rendah (Plot-2), memiliki kepadatan populasi sekitar 260 anakan per hektar dan 20 pohon sagu muda per hektar. Plot-1

dan Plot-2 merupakan plot yang hanya ditumbuhi oleh pohon sagu, hampir tidak ada pohon lain tumbuh pada plot tersebut. Sementara itu, Plot-3 dan Plot-4 merupakan hutan sagu campuran, dimana sumbangan carbon dari pohon selain sagu mencapai 60%.

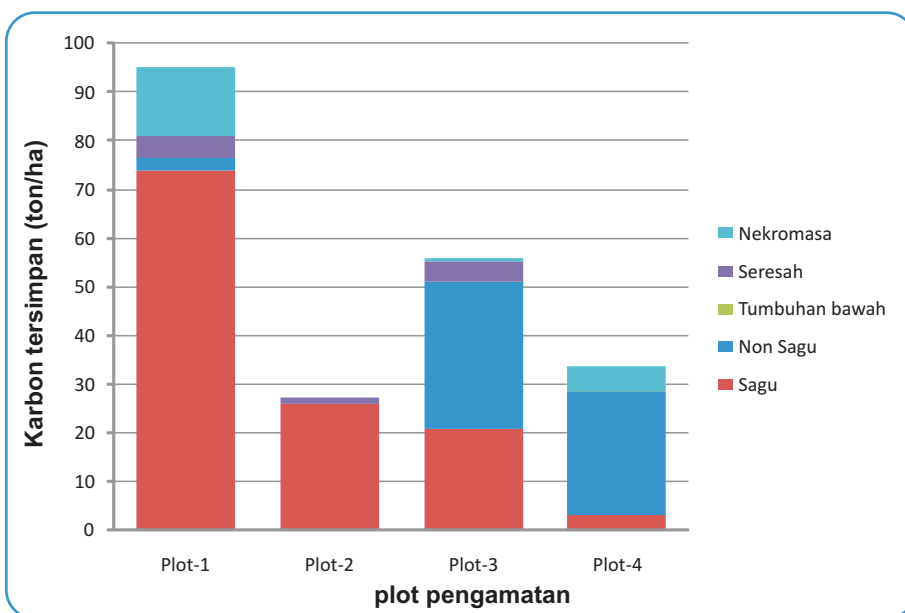
Hutan sagu sebagai habitat keanekaragaman hayati

Hutan sagu menyerupai hutan alam yang memiliki berbagai strata pertumbuhan dalam satu hamparan, mulai dari anakan, tanaman yang mulai berbatang, tanaman muda, tanaman siap panen dan tanaman tua. Demikian pula dengan keragaman jenisnya. Dalam satu hamparan hutan sagu terdiri dari pohon sagu dengan berbagai kualitas yang didasarkan pada produktivitas dan warna sagu. Oleh

karena itu, pemanenan sagu dilakukan secara cermat, karena hanya memilih pohon yang memiliki kematangan tepat dan produktivitas tinggi.

Sekitar 51 jenis sagu di Papua dengan berbagai keragaman kualitas telah teridentifikasi. Keragaman tersebut merupakan sumber plasma nutfah yang harus dilestarikan karena berpotensi sebagai sumber daya genetik yang dapat dimanfaatkan dalam pemuliaan tanaman sagu di masa mendatang untuk mendapatkan varietas-varietas unggul. Selain sagu, berbagai jenis pohon kayu-kayuan seperti kayu hitam (*Diospyros sp.*), matoa (*Pometia pinnata*), terentang (*Camptosperma sp.*) dan jenis-jenis tanaman pioneer tumbuh di hutan sagu. *Diospyros sp.* yang merupakan satu-satunya genus dari famili Ebenaceae banyak dieksploitasi dari hutan alam untuk berbagai penggunaan sehingga populasinya semakin menurun.

Dari kedua hal di atas, dapat disimpulkan bahwa hutan sagu memiliki potensi sebagai penyimpan karbon yang berperan dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi, dan juga memiliki peranan penting dalam konservasi, baik konservasi terhadap plasma nutfah berbagai jenis sagu maupun konservasi terhadap pohon-pohon hutan lainnya. Peran yang tidak kalah penting adalah sebagai penyedia sumber bahan makanan pokok. Tentunya, peran tersebut membuka peluang untuk melakukan kajian lebih dalam dari hutan sagu. Oleh karena itu, marilah kita jaga kelestariannya.



Gambar 1. Cadangan karbon pada hutan sagu di Sentani

Tembawang: bukan sekedar sistem agroforestri

Oleh Bambang Soeharto



Foto-foto oleh Bambang Soeharto



Istilah tembawang telah banyak dibicarakan oleh para peneliti, baik peneliti asing maupun dari Indonesia sendiri. Tembawang yang merupakan sistem penggunaan lahan di masyarakat Suku Dayak, Kalimantan Barat dianggap sebagai ekosistem yang unik karena menyimpan nilai-nilai yang sangat tinggi. Tidak hanya sekedar memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, tetapi juga mengandung nilai ekonomi dan nilai moral konservasi.

Tembawang atau sering disebut sebagai agroforest tembawang adalah suatu bentuk sistem penggunaan lahan yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, mulai dari pohon-pohon besar berdiameter lebih dari 100 sentimeter hingga tumbuhan bawah sejenis rumput-rumputan. Sistem ini dikelola dengan teknik-teknik tertentu sesuai dengan kearifan lokal mereka dan mengikuti aturan-aturan sosial sehingga membentuk keanekaragaman yang kompleks menyerupai ekosistem hutan alam.

Pembentukan dan kepemilikan Agroforest Tembawang

Di masa lalu, sebagian besar masyarakat Suku Dayak memiliki pola pemukiman berpindah-pindah mengikuti pola perpindahan ladang mereka. Di lokasi pemukiman tersebut mereka menanam berbagai jenis

tanaman yang mereka anggap menjadi sumber bahan makanan, bumbu-bumbuan dan tanaman buah-buahan seperti durian, mangga, rambutan, manggis dan entawak. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun menanam tanaman karet dan tengkawang di lokasi tersebut. Namun demikian, tidak semua tumbuhan yang ada di dalam sistem agroforest tembawang adalah hasil penanaman, ada juga tumbuhan yang tumbuh secara alami dalam proses regenerasi alam seperti nyatuh, jenis-jenis rotan, tumbuhan merambat (liana), tumbuhan semak dan herba, bahkan jenis-jenis anggrek pun kebanyakan tumbuh secara alami.

Dalam pengelolaannya, masyarakat adat membagi agroforest tembawang menjadi empat jenis yaitu: (1) agroforest tembawang umum yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama bagi penduduk dalam satu desa atau lebih; (2) agroforest tembawang waris tua yang telah dimiliki antara tiga sampai enam oleh kelompok seketurunan; (3) agroforest tembawang waris muda yang dimiliki antara satu sampai dua generasi yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh keluarga besar dan (4) agroforest tembawang pribadi yaitu tembawang muda yang dimiliki secara perorangan.

Nilai-nilai konservasi Agroforest Tembawang

Tiga hal utama dalam konservasi adalah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Perlindungan dan pelestarian mengandung nilai-nilai sosial budaya yang luhur yaitu memikirkan kebutuhan generasi yang akan datang, sementara pemanfaatan mengandung nilai ekonomi. Dalam hal ini makna konservasi bukan hanya sekedar melindungi dan melestarikan, tetapi juga memanfaatkan. Nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi yang terintegrasi menciptakan suatu nilai ekologi. Agroforest tembawang merupakan sistem pengelolaan lahan yang memiliki tiga komponen tersebut, bukan hanya sekedar sistem agroforestri yang memiliki berbagai jenis tumbuhan yang membentuk lapisan-lapisan tajuk, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang sangat luhur.

Nilai ekonomi

Pembangunan agroforest tembawang tidak memerlukan tenaga kerja dan modal yang besar, demikian pula untuk pengelolaannya. Agroforest tembawang dikelola secara minimal, tidak ada pembersihan gulma, pemupukan apalagi pengendalian hama penyakit. Dalam sistem ini tumbuh berbagai

spesies lokal seperti meranti, kayu besi dan jenis-jenis tumbuhan lainnya. Pembabatan tumbuhan yang tidak berguna hanya dilakukan saat akan panen untuk mempermudah pemanenan.

Beberapa hasil dari sistem agroforest tembawang seperti lateks (getah tanaman karet), biji tengkawang, getah perca dari jenis nyatuh dan getah jelutung merupakan produk-produk ekspor. Sementara itu, hasil buah-buahan seperti durian, nangka, mangga, cempedak, duku, rambutan, langsung, rotan, gula merah, ijuk dan lain-lain mereka jual ke pasar dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian kebutuhan sehari-hari masyarakat Dayak hampir seluruhnya dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam sistem agroforest tembawang.

Hasil tanaman karet (getah karet) memberikan sumbangan yang paling besar pada pendapatan dari agroforest tembawang yaitu lebih dari 50%. Namun demikian, kondisi tanaman yang rata-rata sudah berumur tua berdampak pada tingkat produksi lateks yang rendah. Maka dari itu, pengkayaan dan peremajaan karet dengan jenis-jenis karet varietas unggul yang mempunyai produksi lateks lebih tinggi perlu dilakukan. Hasil kajian pada sistem agroforest tembawang menunjukkan bahwa upaya pengayaan dan peremajaan dengan menambahkan 350 pohon karet dapat memberikan tambahan pendapatan pada masyarakat. Analisis terhadap nilai NPV agroforest tembawang pada tiga tingkat suku bunga 6%, 15% dan 25% secara berturut-turut adalah Rp 485.576.758; Rp 125.372.065 dan Rp 33.989.636. Nilai NPV ini menunjukkan bahwa upaya peremajaan tanaman karet per-hektar layak secara finansial pada berbagai tingkat suku bunga.

Nilai sosial budaya

Pengelolaan agroforest tembawang yang diatur kepemilikan dan pemanfaatannya berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari pemanfaatan pribadi, keluarga inti, keluarga besar hingga ke tingkat desa mengandung nilai-nilai sosial budaya



yang sangat tinggi. Kepatuhan antar anggota masyarakatnya merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawabnya terhadap aturan. Demikian pula, dengan perijinan penebangan pohon yang hanya diperbolehkan bilamana ada ijin dari seluruh anggota keluarga besar. Aturan-aturan ini sudah menjadi pembatas dari kerusakan dan kepunahan akibat pemanfaatan dan penebangan pohon yang tanpa memperhatikan kemampuan regenerasi dari pohon tersebut.

Agroforest tembawang yang dimiliki dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga mencapai lima atau enam generasi yang mengandung nilai luar biasa terhadap kelestarian dan keberlanjutan bagi generasinya. Penanaman dan pemeliharaan pohon berumur panjang seperti tengkawang, jelutung, nyatuh dan kemenyan merupakan pemikiran jauh ke depan, artinya tidak hanya berfikir untuk dirinya tetapi juga memikirkan generasi berikutnya. Agroforest tembawang juga merupakan sistem yang telah dikembangkan sejak ratusan tahun lalu, sehingga merupakan bagian dari tradisi, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Dayak.

Nilai ekologi

Agroforest tembawang sudah terbukti memiliki nilai ekologi yang tinggi. Berbagai jenis tumbuhan yang ada di dalamnya menyediakan jasa ekosistem, berupa: (1) pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan, misalnya sumber bahan makanan dan obat-obatan; (2) sebagai jasa pengatur sistem, misalnya penyedia air; (3) sebagai jasa dalam

budaya, misalnya perekat hubungan kekerabatan dan (4) sebagai pendukung kehidupan misalnya menjaga tingkat kesuburan tanah.

Di dalam agroforest tembawang tumbuh berbagai jenis tumbuhan penghasil pangan seperti buah-buahan, penghasil karbohidrat dan tumbuhan obat. Berbagai jenis tumbuhan dengan tajuk berlapis-lapis mampu memberikan perlindungan terhadap kesuburan tanah, baik melalui masukan bahan organik yang berasal dari seresah yang jatuh, maupun

dari kemampuan menahan terpaan air hujan yang dapat merusak struktur tanah. Hal ini menunjukkan agroforest tembawang mampu memberikan jasa pendukung sistem kehidupan yang berpengaruh positif terhadap sistem tata air yang ada di dalamnya.

Struktur kanopi yang menyerupai hutan memungkinkan berbagai jenis satwa datang ke sistem ini, baik untuk mencari makan maupun bertempat tinggal. Dinamika pergerakan satwa dan cara mencari makannya secara tidak langsung dapat membantu penyerbukan dan pemencaran biji yang pada akhirnya berperan dalam pengaturan sistem regenerasi tumbuhan. Pepohonan pada sistem tembawang yang mencapai umur puluhan tahun berpotensi besar dalam menyerap karbondioksida dari udara sehingga memiliki peranan dalam pengaturan iklim makro, namun terutama terhadap iklim mikro di sekitarnya.

Sebagai inti dari uraian ini, tembawang yang berperan penting sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Suku Dayak, bermanfaat sebagai lahan pelestari sumberdaya genetik tumbuhan baik secara in-situ maupun eks-situ, dan juga sebagai kantung ekologi bagi spesies-spesies liar. Selain itu juga memiliki nilai-nilai sosial budaya yaitu pelestarian untuk generasi yang akan datang dan merupakan tradisi yang mereka lakukan secara turun-temurun.

Sistem Wanatani: masih tetap idola pengelola kebun kopi

Oleh Kurniatun Hairiah

“Wanatani kopi tetap idola bagi pengelola kopi di era pemanasan global, karena sistem ini menyediakan jasa lingkungan lewat perannya dalam mempertahankan populasi 'luwak', si pemetik jitu buah kopi, mengendalikan populasi nematoda parasit tumbuhan serta menjaga kondisi tanah tetap gembur, menyerap dan menyimpan karbon, serta mengatur tata air”, itulah catatan ringkasku selama mengikuti Simposium Kopi.



Foto: Kurniatun Hairiah

Simposium nasional dengan topik “Kopi: Penguatan Peran Teknologi untuk Mendukung Agro-Industri Kopi Nasional” diselenggarakan di Bali pada tanggal 3-8 Oktober 2010. Kegiatan ini merupakan inti dari acara peringatan hari jadi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang didirikan oleh Asosiasi Perkebunan Belanda pada tahun 1910, dan diselenggarakan bersamaan dengan Konferensi Internasional Ilmu Kopi ke-23 (<http://www.asic2010bali.org/>).

Pada awal berdirinya, lembaga penelitian tersebut menggunakan sistem multistrata wanatani dalam budidaya kopi dan kakao. Topik penelitiannya difokuskan pada peningkatan kualitas bibit, pengelolaan lahan (kesuburan tanah dan pengendalian hama), proses pasca panen dan pemasaran. Seratus tahun kemudian, topik-topik tersebut masih sangat relevan.

Kopi diperkenalkan di Indonesia pada abad ke-17, melalui penyelundupan biji kopi dari Yemen yang mencoba memonopoli komoditas utama tersebut di pasaran Eropa. Saat ini Indonesia telah mengekspor 600-700 ton kopi tiap tahunnya, dimana lebih dari 85%-nya diproduksi dari kebun kopi rakyat melalui sistem wanatani, sebagai sumber penghasilan bagi lebih dari 1 juta petani kecil.

Dalam pidato pembukaannya pada Konferensi Internasional IASC, Menteri Pertanian menekankan bahwa untuk bersaing dalam perdagangan kopi dunia, sistem produksi kopi di Indonesia tidak hanya terfokus pada ambisi ekonomi, tetapi juga melaksanakan beberapa penelitian terkait dengan aspek layanan lingkungan dari kebun kopi, termasuk diantaranya penyerapan dan penyimpanan karbon dalam kebun kopi yang saat ini banyak dilakukan oleh partner-partner nasional ICRAF.

Kopi istimewa dari sistem wanatani Indonesia dengan bijinya yang panjang ini lebih populer disebut “Kopi Luwak”. Kopi ini dipanen oleh *Paradoxurus hermaphroditus* yang dalam Bahasa Jawa disebut Luwak atau dalam bahasa Indonesianya disebut musang. Biji kopi berkualitas tinggi tersebut diambil dari sisa kotoran luwak. Berdasarkan penelitian terakhir, hasil panen biji kopi oleh luwak yang dikandangkan tidak sebaik kualitas kopi yang dipanen oleh luwak liar.

Kopi arabika luwak liar beraroma sangat harum, dan cita rasa yang kuat dengan tingkat kemasaman sedang, sedangkan rasa kopi luwak kandang sama dengan kopi arabika biasa yang dipanen oleh manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan citarasa lebih baik bukan karena biji kopi telah melalui pencernaan luwak, tetapi lebih disebabkan karena kejelian hewan



Atas: Luwak liar, si pemanen jitu buah kopi. **Bawah:** pengumpulan Kopi dalam kotoran Luwak Liar. (Foto: Jusianto, dkk)

tersebut dalam memilih biji yang terbaik untuk dipanen.

Kopi luwak adalah kopi yang termahal di dunia, meskipun hewan luwak yang menjadi pemanennya adalah makhluk pemangsa ternak petani seperti ayam, bebek dan hewan kecil lainnya, sehingga luwak tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal dari petani di sekitar perkebunan. Apa hubungannya dengan wanatani? Hal tersebut menjadi suatu pertanyaan yang menarik. Luwak membutuhkan makanan lain selain biji kopi juga membutuhkan habitat yang cocok seperti di hutan. Oleh karena itu, sistem wanatani (agroforestri) masih tetap merupakan idola pengelola kebun kopi di masa yang akan datang.

Selama symposium, Tim peneliti Universitas Brawijaya dan ICRAF melaporkan bahwa pohon penaung kopi yang beragam dalam system wanatani dapat mengurangi populasi nematoda parasit tanaman.

Gliricidia sepium atau umumnya disebut Gamal merupakan pohon penaung pada sistem kakao, tetapi juga populer pada sistem kopi. Tanaman tersebut paling efektif dapat mengendalikan nematoda parasit



Foto: Kurniatun Hairiah

Para peserta simposium berfoto bersama.

tanaman, tetapi sayangnya juga menekan populasi cacing penggali tanah yang bermanfaat untuk meningkatkan resapan air hujan. Penanaman rumput-rumputan pada lahan berlereng yang memotong kontur dapat mengurangi erosi dan meningkatkan infiltrasi, namun juga meningkatkan populasi nematode. Petani kopi di Sumberjaya (Lampung Barat) dan Ngantang (Malang), sistem kopi multistrata dengan campuran *gliricidia* dan pepohonan lainnya merupakan sistem yang paling baik dalam menjaga tanah tetap 'dingin' – tanah subur dan gembur – mudah diolah karena banyak seresah di permukaan tanah.

Pesan sederhana yang harus disampaikan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan iklim adalah perlunya menjaga tanah tetap 'dingin' dengan mempertahankan keanekaragaman dan kerapatan pepohonan beserta seresahnya di dalam sistem. Hasil-hasil penelitian yang kompleks harus dikomunikasikan dengan cara yang lebih sederhana

sehingga mudah dipahami.

Bertepatan dengan ulang tahun Lembaga Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (ICCRI) yang ke 100, acara ditutup dengan pelepasan 100 lampion ke udara oleh semua peserta, dan sepagat akan bertemu lagi di konferensi ASIC ke-24 di Costa Rica tahun 2014.

Sebagai penutup, penulis ucapkan terima kasih kepada kepada ASIC dan ICRAF SEA serta Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Germany melalui Proyek TUL-SEA (Trees in multi-Use Landscapes Southeast Asia) yang telah memberikan dana sehingga penulis dapat terlibat dalam kegiatan ini.

Penulis adalah Guru Besar di Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.

Email: kurniatunhairiah@gmail.com dan k.hairiah@cgiar.org



Foto: Jusianto, dkk.



Foto: Yayorin

Pak Usub: dari Serumpun berkarya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar sungai Lamandau

Oleh Janudianto dan Subekti Rahayu

Berada di bagian selatan Pulau Kalimantan, tepatnya di salah satu desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, M. Subeli atau yang akrab dipanggil Pak Usub berkarya demi mensejahterakan masyarakatnya. Laki-laki kelahiran Barabai, Kalimantan Selatan 51 tahun silam ini merupakan salah satu dari sekian banyak pendatang yang mencoba mengadu nasib di Serumpun, Desa Tanjung Putri. Anak kedua dari lima bersaudara ini merupakan salah seorang tokoh tani di dua kelompok saat ini, *Kelompok Tani Serumpun* dan *Kelompok Tani Serumpun Padi*. Bapak dua anak ini pandai berbicara dan senang sekali bercerita, tentunya dengan logat Banjar yang kental.

Salah satu ceritanya yang menarik adalah bagaimana dia memutuskan untuk tinggal menetap di Serumpun dan memulai kiprahnya di bidang pertanian. Serumpun merupakan kelompok permukiman yang masuk wilayah Desa Tanjung Putri. Secara administratif, Desa Tanjung Putri merupakan salah satu desa di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Desa ini merupakan desa paling ujung yang berada di muara Sungai Lamandau dan juga berseberangan dengan kawasan penyangga Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, yang merupakan tempat pelepas-liaran orangutan Kalimantan. Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin), salah satu lembaga nirlaba di Kotawaringin Barat, menjadikan desa ini sebagai salah satu lokasi pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya pelestarian orangutan sekaligus tetap mempertimbangkan perikehidupan masyarakat sekitarnya.

Sebagian besar masyarakat Serumpun menggantungkan hidupnya sebagai

nelayan dengan mencari ikan di laut maupun di sungai. Hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai pedagang, petani padi dan sayur-sayuran.

Sekitar tahun 1990-an, saat kayu ramin menjadi primadona utama di daerah ini, Desa Tanjung Putri dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas penebangan dan pengolahan kayu. Banyak pendatang, termasuk Pak Usub dan keluarganya tertarik untuk ikut mencari rejeki dengan menebang dan menjual kayu hasil tebangannya, ataupun menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan kayu atau sawmill yang puluhan jumlahnya di sepanjang Sungai Lamandau.

Pada tahun 2003, Pak Usub memutuskan untuk tidak lagi menggantungkan hidupnya dari menebang kayu. Dia berpikir bahwa kayu-kayu di hutan pada saatnya akan habis apabila ditebang terus-menerus. Maka dia mencoba memulai usaha dengan membuka lahan pertanian menetap dari lahan terlantar bekas tebangannya sebelumnya, yaitu dengan menanam padi sawah dan sayur-sayuran seperti sawi dan kacang panjang di Serumpun. Lahan terlantar bekas aktivitas penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengolahan kayu di desa ini memang cukup luas.

Bertani menetap merupakan sesuatu yang baru, mengingat budaya setempat selalu menggunakan sistem perladangan berpindah untuk menanam padi dan sayur-sayuran. Mereka juga beranggapan bahwa bertani menetap tidak cocok dan tidak menguntungkan.

Pak Usub juga dianggap nekat dengan bertanam padi di Serumpun, karena selama ini sebagian besar masyarakat

menganggap bahwa Serumpun bukanlah daerah yang cocok untuk bertanam padi dan sayur-sayuran. Bahkan masyarakat setempat menganggap mustahil berhasil bila bertanam padi di daerah ini. Anggapan masyarakat tersebut sebenarnya bukanlah tanpa alasan yang jelas. Bila melihat lokasi yang sangat dekat dengan laut, maka intrusi air laut di saat kemarau atau banjir bandang bisa datang sewaktu-waktu di saat musim penghujan akan menjadi ancaman terbesar bagi padi dan tanaman pertanian lainnya di sekitar wilayah tersebut.

Berbekal pengalaman yang didapat dari petani di daerah asalnya di Kalimantan Selatan, Pak Usub bersama beberapa rekannya mencoba merancang dan membangun sebuah area persawahan yang dikelilingi oleh tanggul dan parit. Parit ini dihubungkan dengan sebuah saluran irigasi yang memiliki pintu air untuk mengatur keluar masuknya air dari dan ke sungai, sehingga kebutuhan air bagi tanaman padi dapat diatur secara tepat baik dari segi jumlah maupun waktunya.

“Saat pasang Sungai Lamandau, air dibiarkan masuk, lalu pintu airnya ditutup sehingga air bisa bertahan” demikian jelas Pak Usub pada kami saat mengunjungi tempat tinggalnya.

Tidak hanya masyarakat sekitar yang tidak yakin dengan usaha Pak Usub. Saat bertemu dengan petugas Dinas Pertanian dan menceritakan pengalamannya di Serumpun, seolah petugas tersebut sempat menyangsikan keberhasilannya.

“Masa bapak bisa menanam kacang panjang dan sawi (di lahan tersebut)?” untkap Pak Usub menirukan ucapan

petugas dari Dinas Pertanian. Petugas tersebut awalnya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Usub. Menanam pohon keras seperti mangga dan buah-buahan saja sulit sekali di daerah rawa yang kerap tergenang, apalagi menanam sayur-sayuran seperti sawi, kacang panjang, dan kangkung yang memerlukan perawatan lebih intensif.

“Ya, kalau hanya cerita tanpa melihat buktinya mungkin Bapak tidak percaya, karena tempat itu kan daerah rawa. Sekarang Bapak bisa lihat buktinya, sejak tahun 2003, 2004, sampai 2005 saya menanam sayur”.

Selain menanam padi dan sayur-sayuran, Pak Usub juga mencoba mengembangkan kebun mangga. *“Kebun mangga juga ditanggul keliling, saat air surut pintu dibuka, saat air pasang pintu ditutup, sehingga selalu kering dan jadi pematang”* jawab Pak Usub berusaha meyakinkan.

Memang usaha yang dilakukan Pak Usub dan anggota Kelompok Tani Serumpun ini tidaklah sia-sia. Pohon mangga dan kuini yang ditanam di pematang pun tumbuh dengan suburnya, bahkan sudah pernah dipanen. Pada saat musim berbuah, satu pohon bisa menghasilkan rata-rata 25 kg, yang hanya dipasarkan ke kampung dan desa sekitar. Selain mangga dan kuini, ditanam juga nangka, jambu, jambu bol, sirsak, sawo dan belimbing. Bahkan pohon jelutung juga dicoba ditanam di antara sawah-sawahnya, dengan harapan anak cucunya akan dapat menyadap jelutung di kemudian hari.

“Karena dikelilingi tanggul seperti ini maka bisa ditanam mangga, air bisa kami atur untuk mengeringkan dasarnya. Bila ingin, bisa juga untuk menanam sayur. Saat ini karena padi pemasarannya mudah, maka lebih baik menanam padi” ujar salah seorang anggota Kelompok Tani Serumpun menambahkan.

« berladang menetap di lahan pasang surut mampu meningkatkan penghasilan petani dibandingkan menebang kayu di hutan »

Kini, berbagai bantuan dari pemerintah setempat berdatangan, mulai dari bantuan untuk pembukaan lahan menggunakan alat berat, pembangunan infrastruktur pendukung, bantuan bibit padi unggul, hingga ternak itik. Luasan lahan yang telah dibuka dan ditanami pun bertambah, mencapai 35 hektar dari total 60 hektar yang direncanakan pada tahun 2009.

Selain mencoba menanam padi bibit unggul varietas Cihayang yang didapat dari bantuan pemerintah setempat, Pak Usub juga menanam bibit lokal, yang katanya lebih tahan terhadap pasang surut dan berasnya lebih enak. Untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman, mereka menggunakan pupuk kandang dan kompos dari ternak itiknya yang jumlahnya mencapai 600 ekor. Sampai saat ini kebutuhan pupuk sudah bisa tercukupi secara swadaya.

Pada 11 Februari 2010 yang lalu diadakan perayaan panen raya perdana tanaman pangan padi sawah untuk lahan menetap Kelompok Tani Serumpun di Desa Tanjung Putri. Camat Arut Selatan dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kotawaringin Barat turut hadir untuk memberikan apresiasi atas jerih payah kelompok tani ini. Pak Camat, H. Modelan mengungkapkan *“Hasil yang dicapai oleh Kelompok Tani Serumpun sebuah contoh bagi pertanian lainnya untuk tidak lagi berpindah-pindah. Berladanglah menetap sehingga hasilnya bisa dirasakan bisa maksimal”.* Sistem pertanian menetap dengan menanam padi, sayur-sayuran dan pohon buah-buahan seperti yang dilakukan oleh Pak Usub dan anggota kelompoknya

terbukti mampu meningkatkan penghasilan mereka, sehingga mereka tidak lagi menebang kayu dari hutan. Dengan demikian, hutan di kawasan penyangga dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau tetap terjaga sehingga orangutan Kalimantanpun masih dapat hidup dengan aman.

“Ini sebuah awal contoh yang baik dari suatu usaha pertanian padi di lahan pasang surut. Dengan teknologi sederhana mampu mencegah lahan dari banjir atau luapan air pasang. Hasil enam ton gabah kering panen per hektar sebuah hal yang luar biasa” sambut Akhmad Yadi, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Keberhasilan yang diperoleh Pak Usub bukanlah mudah, melainkan diwarnai jalan panjang kegagalan demi kegagalan. Namun, Pak Usub tetap berusaha dan mencoba dengan berbagai cara.

Demikianlah sepenggal cerita dari Serumpun, sebuah pengalaman yang sangat menggugah dari seorang Pak Usub, petani yang ulet. Seorang penebang kayu yang berubah haluan menjadi petani peladang menetap dan terus menularkan ilmunya kepada masyarakat sekitarnya. Serta tidak kenal lelah untuk mengajak masyarakatnya melestarikan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau sebagai warisan bagi anak cucu kelak.

“Konservasi dapat dicapai seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat”.

Sumber:

Wawancara langsung dengan Pak Usub dan komunitasnya.

<http://www.rareplanet.org/en/campaign-blog/himbauan-berladang-menetap-di-hari-panen-raya-padi-serumpun-tanjung-putri>

Foto: Subekti Rahayu



❖ **Konferensi International: Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat**

28 -30 Januari 2011
Guwahati City, India

Konferensi ini diadakan untuk mendiskusikan beberapa isu dan tantangan yang memotivasi pemerintah pusat dan pemberi dana untuk terlibat dengan proyek air. Walaupun ada pengakuan umum tentang kebutuhan komunitas akan sistem air yang handal, perencanaan lingkungan dan pengelola sumber daya air mengaku jika mereka sudah memberikan sedikit perhatian terhadap perbedaan perilaku, perspektif, dan kebutuhan masyarakat pedalaman terhadap akses air dan penggunaannya. Secara khusus, konferensi ini akan lebih fokus pada konteks umum, khususnya di negara India, seperti pembelajaran dari beberapa pengalaman dan penelitian aksesibilitas air dan penggabungan antara peranan ekonomi masyarakat dan perencanaan sumber daya air.

Informasi lebih lanjut:

Dr. Shikhar Sarma
Chairman, Technical Committee, WATERCON - 2011
Dept of Computer Science, Gauhati University,
Guwahati, Assam-781014, India
Email: waterpfi@gmail.com
Website: <http://www.pfiound.org/watercon/index.html>

❖ **Harmonisasi Peraturan Terkait Permasalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Wilayah Pertambangan: Penetapan PP Baru Sebagai Amandemen dari PP Tata Ruang**

31 Maret 2011
Jakarta, Indonesia

Tumpang tindih peraturan perundang-undangan antara UU Minerba, UU Tata Ruang, serta UU Kehutanan telah menimbulkan dampak terhadap kelangsungan bisnis industri pertambangan di Indonesia. Hal ini terkait dengan proses pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang ketentuannya berbeda satu dengan yang lainnya. Keberadaan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN) ternyata telah menghambat pemberian izin tersebut.

Melihat permasalahan yang ada ini, kami ADCO (Abu Dhabi Oil Company) Indonesia, bermaksud untuk memberikan pelayanan kepada para stakeholders terkait permasalahan tumpang tindih peraturan ini. Kami akan menyelenggarakan seminar dengan dihadiri para pembicara dari institusi pemerintah terkait, sehingga para peserta mendapatkan pencerahan akan permasalahan yang dihadapi selama ini.

Informasi lebih lanjut:

ADCO (Abu Dhabi Oil Company) INDONESIA
Tel: 021 30015675
E-mail: adco@adcoindonesia.com
Website: www.apbi-icma.com/event.php?id=83&act=detail

❖ **3rd IndoGreen Forestry Expo 2011**

14 - 17 April 2011
Jakarta, Indonesia

"IndoGreen Forestry Expo" adalah pameran kehutanan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan sejak 2009, menampilkan potensi yang sangat besar pada sektor kehutanan, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian hutan, hasil hutan baik kayu maupun non kayu, produk olahannya dan peralatan pemanfaatan hutan.

Pada 2011, "IndoGreen Forestry Expo 2011" diselenggarakan untuk memperingati tahun kehutanan Internasional dan mendukung upaya merealisasikan Konsep Gaya Hidup yang Hijau Menuju Indonesia Hijau (Green Living Concept Towards Green Indonesia).

Informasi lebih lanjut:

PT. Wahyu Promo Citra
Jl. A. No. 1, Rawabumbu I, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. 021 7810768
E-mail: wpcitra@dnet.net.id
Website: www.indogreen-ina.com

Stewardship Agreements to Reduce Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) in Indonesia

Ratna Akiefnawati, Grace B.Villamor, Asep Ayat, Gamma Galudra dan Meine van Noordwijk



Jika dunia ingin mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi, permasalahan mengenai siapa yang mengontrol hutan dan daerah pinggirannya harus dapat diselesaikan. Indonesia, negara dengan emisi karbon tertinggi, menyatakan secara global komitmennya untuk ikut dalam Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA), yang mencakup hutan dan lahan gambut dalam bentuk agroforestri dan lanskap pertanian. Perjanjian pengawasan daerah pinggir hutan merupakan kunci keberhasilan untuk program-program di atas, tetapi untuk daerah yang lebih luas, peraturannya harus lebih disederhanakan.

Opportunities for Reducing Emissions from all Land Uses in Indonesia Policy Analysis and Case Studies

Meine van Noordwijk, Fahmuddin Agus, Sonya Dewi, Andree Ekadinata, Hesti L. Tata, S. Suyanto, Gamma Galudra dan Ujjwal Pradhan



Pengurangan emisi pada sektor pertanian, kehutanan dan lahan lainnya di Indonesia saat ini sedang diperdebatkan agar dapat mencakup semua penggunaan lahan dan perubahan pemanfaatan lahan dalam Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+). Laporan ini menyajikan gambaran umum mengenai dua hal: pembahasan nasional di Indonesia dan kumpulan studi kasus dari lansekap khusus dimana keadaan lokal menjadi bentuk pembahasan.

Moving Beyond REDD: Reducing Emissions from All Land Uses in Nepal

Laxman Joshi, Naya Sharma, P Ojha, DB Khatri, Rajendra Pradhan, Bhaskar Karky, Ujjwal Pradhan, dan Seema Karki



Nepal, negara dengan iklim yang bervariasi, tengah berupaya mengembangkan mekanisme REDD melalui konservasi hutan. Namun demikian, masih terdapat kegagalan mengatasi isu-isu teknis, seperti kebocoran dan ketetapan, dan ketidakmampuan mengurangi emisi jangka panjang. Perlu pendekatan yang tidak semata mata hanya REDD melainkan REDD++ dimana karbon disetiap penggunaan lahan ditinjau. Pendekatan terhadap semua penggunaan lahan akan meminimalkan kesalahan teknis dan mengurangi emisi dengan lebih efektif. Laporan ini mencoba untuk memberikan solusi yang jelas

antara adaptasi dan mitigasi dengan menyoroti bagaimana sumber daya yang berkelanjutan secara bersama-sama mengurangi emisi, meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan ketahanan ekosistem. Tanah pertanian, hutan dan pertanian tradisional memberikan keunikan sehingga mitigasi dan adaptasi dapat seimbang.

Koleksi publikasi dapat di akses melalui:
www.worldagroforestry.org/sea/publications

Informasi lebih lanjut:

Melinda Firds (Amel)
Telp: (0251) 8625415 ext. 756; Fax: (0251) 8625416
email: icrafseapub@cgiar.org